

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari kajian pustaka, yang berfungsi untuk memahami cakupan penelitian, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, menyusun agenda penelitian, dan menghindari duplikasi penelitian, serta memahami perkembangan suatu bidang penelitian dari waktu ke waktu (Chigbu *et al.*, 2023). Teknik-teknik untuk mendapatkan literatur atau penelitian terdahulu yang relevan meliputi pencarian berbasis tema, konsep, pendekatan metodologis, penulis, jurnal, dan periode publikasi. Selain itu, literatur yang dipilih harus dianalisis untuk menemukan kesenjangan penelitian, seperti aspek empiris, pengetahuan, teoritis, metodologis, dan lainnya (Ebidor & Ikhide, 2024). Beberapa penelitian yang relevan dalam konteks penelitian “**Analisis Wacana Kritis Film Lagu untuk Anakku tentang Solidaritas Penyintas Perempuan 1965–1966**” antara lain:

Rujukan penelitian pertama, yaitu “*Representation of Indonesia Women Politicians (Media Analysis to G30S PKI Incident Coverage from 1965 to 2015)*” oleh Sarwono (2024) yang diterbitkan oleh *Journal Gender Equality Disability Social Inclusion and Children*. Penelitian ini mengkaji bagaimana media Indonesia merepresentasikan politisi perempuan dalam liputan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) dari tahun 1965 hingga 2015, dan membawa pengaruh kuat dalam membentuk memori kolektif masyarakat. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap surat kabar nasional, khususnya Kompas, untuk melihat pola representasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dari masa Orde Baru hingga setelah Reformasi. Selain itu, analisis wacana juga diterapkan untuk mengidentifikasi peran dan posisi Gerwani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung berpihak pada kelompok dominan, yaitu pemerintah, dan tidak merepresentasikan kepentingan kelompok subordinat. Selama rezim Orde Baru berkuasa, Gerwani, organisasi perempuan yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dibingkai sebagai organisasi yang militan dan tidak bermoral, sedangkan setelah Reformasi, terdapat upaya untuk memulihkan citra mereka. Selain itu, representasi politisi perempuan cenderung lebih positif apabila mereka mengutamakan pendekatan yang lebih feminin dan tidak terlalu militan, sesuai dengan ideologi keibuan yang masih berperan dalam sistem patriarki. Kesimpulannya, media berperan penting dalam membentuk bias gender dan memori kolektif masyarakat terhadap aktivis dan politisi perempuan kontemporer dalam memperjuangkan kepentingan mereka saat ini. Sementara itu, meskipun sama-sama menganalisis media berita, tetapi penelitian berikutnya menerapkan metode analisis wacana kritis (AWK) model Teun Adrianus van Dijk untuk memahami bagaimana media berita membingkai pemberitaan tentang komunisme.

Rujukan penelitian kedua, yaitu “**Analisis Diskursus Berita Komunisme Harian Kompas Sebelum dan Sesudah Peristiwa Gerakan 30 September 1965.**” Penelitian yang dilakukan oleh Kudri & Ciptadi (2023) dan diterbitkan oleh *IMAJI* ini menganalisis bagaimana berita media massa dipengaruhi oleh

konteks sosial dan politik. Kompas, sebagai salah satu media besar di Indonesia, mengalami perubahan posisi dalam memberitakan komunisme sebelum dan sesudah peristiwa G30S. Dengan menggunakan AWK model van Dijk, temuan penelitian mengungkapkan bahwa sebelum peristiwa G30S, Kompas memberitakan komunisme secara hati-hati dan netral, tetapi setelah peristiwa tersebut, Kompas berubah menjadi media yang menyudutkan PKI, selaras dengan wacana antikomunisme yang dominan pada saat itu. Hal tersebut didapatkan setelah membongkar struktur pemberitaan berbeda dalam hal makro (topik berita), suprastruktur (alur berita), dan mikro (pilihan kata dan *framing*). Kesimpulan penelitian ini adalah Kompas menyesuaikan pemberitaannya dengan konteks sosial dan politik yang berlangsung, dan bagaimana media dapat digunakan untuk membentuk opini publik. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa media tidak bebas nilai dan dipengaruhi oleh kepentingan sosial dan politik yang dominan. Meskipun menggunakan AWK model van Dijk yang serupa, penelitian berikutnya menganalisis buku-buku karya Tempo untuk menggali representasi tokoh-tokoh kiri di media Indonesia.

Rujukan penelitian ketiga, yaitu Ahmadi *et al.*, (2023) dalam artikel berjudul “*Leftist Narratives in Tempo Books: Van Dijk Critical Discourse Analysis (CDA) Perspective*,” yang diterbitkan di *OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra*. Penelitian ini mengkaji bagaimana narasi tentang tokoh kiri dalam buku *Musso: Si Merah di Simpang Republik* dan *Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara* dikonstruksi oleh Tempo, media cetak yang berpengaruh dalam jurnalisme Indonesia. Dengan metode kualitatif-interpretatif dan AWK model van Dijk,

penelitian ini mengungkapkan bahwa Tempo menaruh keberpihakan pada PKI dengan membangun citra Musso dan Aidit sebagai sosok yang humanis, nasionalis, dan religius, serta mengkritik Suharto terkait gerakan G30S dengan menilai kelompok kiri adalah korban represi rezim Orde Baru. Penelitian ini juga membahas bagaimana kedua buku tersebut cenderung dicetak dengan warna merah, yang melambangkan komunisme. Kesimpulannya, media berperan penting dalam mengonstruksi pemahaman sejarah publik, dan bagaimana wacana dalam buku dapat menggugat wacana dominan yang telah ditanam di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan penelitian lanjutan dengan pendekatan perbandingan lintas negara dan wawancara dengan pihak terkait. Penelitian selanjutnya menggunakan artikel berita daring sebagai basis analisis dengan metode AWK, tetapi menerapkan model berbeda, yaitu dari Norman Fairclough.

Rujukan penelitian keempat, yaitu **“Analisis Wacana Kritis (AWK) terhadap Teks Sejarah dalam Artikel “Tahanan Politik Wanita di Plantungan”**” oleh Nurbaity *et al.* (2024), yang diterbitkan dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*. Analisis yang dilakukan menggunakan AWK model Norman Fairclough ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teks berupa artikel berita daring [Liputan6.com](https://www.liputan6.com) tentang tahanan politik perempuan, termasuk Gerwani di Kamp Plantungan dikonstruksi dan dikontekstualisasikan dalam wacana sejarah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artikel tersebut membentuk wacana tentang penderitaan para penyintas dengan mengadopsi istilah seperti kamp untuk membandingkan pengalaman mereka dengan kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia yang dibangun oleh Nazi saat

peristiwa Holocaust terjadi. Selain itu, ditemukan adanya ketidakberesan sosial, berupa stigma berkelanjutan terhadap penyintas perempuan 1965–1966, seperti “Musuh negara” atau “Bekas PKI,” dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami, baik selama pengasingan maupun setelah pembebasan. Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa wacana tentang tahanan politik perempuan masih dipenuhi dengan konstruksi ideologis yang menstigmatisasi mereka sebagai ancaman bagi Indonesia. Apabila media berita cenderung mereproduksi wacana dominan tentang antikomunisme, penelitian selanjutnya justru menyoroti bagaimana film berpotensi membongkarnya.

Rujukan penelitian kelima, yaitu **“Indonesia dalam Bingkai Joshua Oppenheimer: Dekonstruksi Wacana Dominan terhadap PKI pada *Sequence Reka Adegan di Film Jagal dan Senyap*.”** Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2020) dan diterbitkan oleh *IMAJI* ini menganalisis dua film dokumenter, yaitu *Jagal* dan *Senyap* karya Joshua Oppenheimer. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap wacana dominan tentang antikomunisme. Alih-alih memberikan pandangan objektif terhadap ideologi, PKI di Indonesia kerap kali dikonstruksikan secara negatif oleh rezim Orde Baru untuk meminggirkan lawan politiknya, Sukarno. Dengan teori artikulasi dan dekonstruksi, peneliti menganalisis cara Oppenheimer menampilkan adegan-adegan yang menggambarkan bagaimana algojo mengeksekusi anggota PKI. Reka adegan ini turut melibatkan mantan algojo yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola dekonstruksi yang serupa diterapkan dalam kedua film tersebut, dengan menampilkan pemahaman

baru terhadap film dokumenter yang menantang wacana antikomunisme yang dominan. Meskipun merepresentasikan realitas, film dokumenter juga merupakan bentuk realisme estetik yang tidak selalu merepresentasikan realitas sebenarnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan, terdapat relevansi yang mendukung penelitian ini.

Persamaan secara umum tercermin dalam pembahasan tentang wacana tragedi 1965–1966, terutama penyintas perempuan, dan bagaimana wacana tersebut dikonstruksi dalam berbagai teks, baik dalam artikel berita konvensional maupun daring, buku, maupun film. Selain itu, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan AWK untuk membongkar ideologi yang tersembunyi atau disembunyikan dalam teks serta memahami bagaimana media membingkai wacana tersebut. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana film Lagu untuk Anakkku merepresentasikan solidaritas penyintas. Berikut tabel posisi penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Unit Analisis dan Metode	Hasil Penelitian
1	“ <i>Representation of Indonesia Women Politicians (Media Analysis to G30S PKI Incident Coverage from 1965 to 2015)</i> ,” oleh Sarwono (2024).	<ul style="list-style-type: none"> ● Artikel media atau surat kabar Kompas. ● Analisis isi dan wacana. 	Media mempertahankan stigma negatif terhadap aktivis dan politisi perempuan, terutama terkait Gerwani. Mereka didorong untuk menyesuaikan perjuangan politiknya sesuai dengan sistem patriarki yang masih melekat di Indonesia.

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Unit Analisis dan Metode	Hasil Penelitian
2	“Analisis Diskursus Berita Komunisme Harian Kompas Sebelum dan Sesudah Peristiwa Gerakan 30 September 1965,” oleh Kudri & Ciptadi (2023).	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel media Harian Kompas. • AWK model van Dijk. 	Media Harian Kompas menunjukkan bahwa pemberitaannya sebelum dan sesuai G30S mencerminkan kepentingan politik antikomunis, dengan perubahan struktur berita yang semakin menguatkan dukungan terhadap kelompok dominan pada saat itu, rezim Orde Baru. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh media dalam membentuk opini publik dan <i>public policy</i> .
3	“ <i>Leftist Narratives in Tempo Books: Van Dijk Critical Discourse Analysis (CDA) Perspective</i> ,” oleh Ahmadi <i>et al.</i> , (2023).	<ul style="list-style-type: none"> • Buku <i>Musso: Si Merah di Simpang Republik dan Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara</i>. • AWK model van Dijk. 	Tempo membangun narasi yang berpihak pada kelompok kiri, terutama dengan menyoroti citra positif Musso dan Aidit, menempatkan Suharto atas represi terhadap kelompok kiri dan merekomendasikan penelitian lanjutan dengan pendekatan perbandingan lintas negara dan wawancara.
4	“Analisis Wacana Kritis (AWK) terhadap Teks Sejarah dalam Artikel “Tahanan Politik Wanita di Plantungan,”” oleh Nurbaity <i>et al.</i> , (2024).	<ul style="list-style-type: none"> • Artikel media Liputan6.com. • AWK model Fairclough. 	Wacana tentang tahanan politik perempuan masih dipenuhi dengan konstruksi ideologis yang menstigmatisasi mereka sebagai ancaman bagi Indonesia.
5	“Indonesia dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Film <i>Jagal</i> dan 	Kedua film tersebut

No.	Judul, Peneliti, dan Tahun	Unit Analisis dan Metode	Hasil Penelitian
	Bingkai Joshua Oppenheimer: Dekonstruksi Wacana Dominan terhadap PKI pada <i>Sequence</i> Reka Adegan di Film <i>Jagal</i> dan <i>Senyap</i> ,” oleh Pamungkas (2020).	<i>Senyap</i> karya Joshua Oppenheimer. <ul style="list-style-type: none"> • Teori artikulasi dan dekonstruksi. 	berfungsi sebagai strategi dekonstruksi wacana dominan tentang PKI, dengan menampilkan perspektif algojo dan korban.
6	“Analisis Wacana Kritis Film Lagu untuk Anakku tentang Solidaritas Penyintas Perempuan 1965–1966,” oleh Purwanti (2025).	<ul style="list-style-type: none"> • Film Lagu untuk Anakku. • AWK model Fairclough. 	Bagaimana film Lagu untuk Anakku merepresentasikan solidaritas penyintas perempuan dari tragedi 1965–1966?

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Analisis Wacana Kritis (AWK) dan Representasi

Analisis wacana kritis (AWK) adalah pendekatan multidisiplin yang tidak hanya meneliti struktur wacana, melainkan bagaimana wacana menciptakan dan mempertahankan relasi kekuasaan dalam masyarakat (van Dijk, 2015). AWK berkembang dari Mazhab Frankfurt dan linguistik kritis pada akhir 1970-an di Inggris dan Australia, serta digunakan untuk menyelidiki bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan sosial diwujudkan, direproduksi, dan ditentang dalam teks dan wacana sosial dan politik (van Dijk, 2015). Dalam konteks media, AWK melihat bagaimana kelompok dominan mempunyai kendali lebih besar terhadap wacana melalui akses terhadap sumber daya, seperti media,

politik, dan pendidikan. Film sebagai media wacana berperan penting dalam membentuk persepsi publik dan memori kolektif suatu peristiwa, termasuk tentang penyintas perempuan 1965–1966.

Pendekatan oleh van Dijk ini dikenal dengan sosio-kognitif, karena menitikberatkan pada hubungan antara teks, kognisi sosial (Masitoh, 2020). Van Leeuwen (2008) berpendapat bahwa representasi aktor sosial dalam wacana memengaruhi bagaimana kelompok tertentu dipersepsikan oleh publik (Masitoh, 2020; Waugh *et al.*, 2016), sedangkan Sara Mills (2005) dalam Eriyanto (2001) menambahkan bahwa wacana sering kali memarginalkan kelompok tertentu, termasuk perempuan, sehingga membutuhkan pendekatan feminisme dalam analisis wacana. Salah satu aspek penting dalam wacana adalah representasi, yang merujuk pada bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan tertentu ditampilkan dalam pemberitaan, yang mencakup bagaimana kelompok marginal dihadirkan secara adil atau justru distigmatisasi, serta bagaimana bentuk representasi tersebut disajikan.

Dalam kajian budaya, Hall (2020) menjelaskan bahwa representasi adalah proses produksi makna melalui bahasa dan sistem tanda dalam budaya. Pendekatan representasi terbagi menjadi tiga: refleksionis (bahasa mencerminkan realitas sebagaimana adanya), intensionalis (makna bergantung pada niat pembicara atau penulis), dan konstruksionis (makna dibentuk melalui bahasa dan sistem tanda dalam budaya) (Hall, 2020). Dari ketiga pendekatan ini, pendekatan konstruksionis sering kali diterapkan dalam studi representasi, sebab menekankan

bahwa makna bersifat dinamis, dipengaruhi oleh konteks sosial, serta dapat memperkuat atau menantang norma dan kekuasaan (Hall, 2020).

Lebih lanjut, Hall menghubungkan representasi dengan identitas, politik, dan perbedaan dalam pembentukan makna dan identitas budaya, khususnya dalam konteks ras dan diaspora (Marriott, 2019). Misalnya, pada 1980-an, Hall meneliti identitas Kulit Hitam di Inggris dan mengkaji bagaimana film dan media visual lainnya menjadi ruang ekspresi sekaligus alat produksi wacana yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap identitas tertentu (Harman, 2016). Oleh sebab itu, representasi dalam media tidak netral, tetapi mencerminkan relasi kekuasaan dan ideologi dominan dengan membentuk dan mereproduksi identitas kelompok tertentu, mereka dapat dimarginalkan atau direpresentasikan dengan stereotip tertentu melalui wacana media (Campbell, 2016). Salah satu bentuk relasi kekuasaan dalam representasi adalah marginalisasi perempuan dalam wacana. Mills (2005) menyoroti bagaimana perempuan dalam media sering kali diposisikan dalam relasi kekuasaan yang tidak setara. Ia juga menjelaskan bahwa wacana feminitas mengikat perempuan dalam norma gender yang menekankan kepatuhan, kesopanan, dan peran domestik.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana representasi bekerja dalam membentuk makna, pemikir lainnya, seperti Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes menjadi relevan. De Saussure melihat bahasa sebagai sistem tanda yang terdiri dari dua elemen: *signifier* (penanda) seperti kata, gambar, atau suara, dan *signified* (petanda), yaitu konsep atau makna yang dirujuk oleh tanda tersebut (Saussure & Sechehaye, 1959). Sementara itu, Barthes memperluas teori de

Saussure dengan menjelaskan bagaimana representasi tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga membawa ideologi dan mitos, dengan membedakan denotasi (makna literal atau deskriptif dari tanda) dan konotasi (makna tambahan yang berhubungan dengan ideologi atau budaya). Dengan kata lain, representasi tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga membentuk dan memperkuat ideologi yang dominan dalam masyarakat (Hall, 2020).

2.2.2. Film sebagai Media Wacana dan Memori Kolektif

Memori kolektif adalah interaksi kompleks antara ingatan individu dan pengaruh sosial (monumen, peringatan, teks resmi), yang berperan penting dalam mengingat dan menafsirkan masa lalu, membentuk identitas kelompok, menjaga kohesi sosial, dan mengarahkan tindakan di masa depan mereka (Orianne & Eustache, 2023). Memori kolektif bersifat dinamis, yang berkembang seiring waktu dan dapat selalu diperdebatkan, dipertanyakan, dan direkonstruksi ulang. Kelompok yang berbeda dapat memiliki memori yang saling bertentangan terhadap peristiwa yang sama, yang menunjukkan perspektif dan minat yang khas mereka (Roediger, 2021). Film sebagai media wacana sering kali menjadi alat utama dalam konstruksi ingatan ini, baik dengan mempertahankan wacana sejarah yang dominan maupun menentangnya, termasuk dalam merepresentasikan pengalaman penyintas perempuan 1965–1966. Van Leeuwen (2015) menjelaskan bahwa wacana tidak hanya berupa teks, tetapi juga bersifat multimodal, menggunakan bahasa, gambar, suara, dan elemen visual lainnya untuk membangun makna.

Sebagai media wacana, film juga menerapkan berbagai teknik semiotika dan linguo-semiotik untuk menyampaikan pesan. Zheltukhina *et al.*, (2023) menjelaskan bahwa wacana dalam film bersifat multimodal, dengan menggabungkan berbagai saluran komunikasi visual dan auditori yang memengaruhi proses kognitif penonton. Selain itu, Baxtiyorovna (2022) menyoroti bahwa wacana film mencerminkan karakteristik etnokultural dan lingkungan sosial, yang menjadikannya relevan untuk dieksplorasi dalam konteks narasi budaya dan interaksi antarbudaya. Film adalah sistem terdiri dari dua lapisan utama, yaitu: entokomponen (teks film, dialog, visual), dan ektokomponen (pratonton, pengumuman, dan slogan). Kedua lapisan ini saling berinteraksi dan berkontribusi dalam penerapan fungsi wacana dalam film. Oleh karena itu, film lebih dari sekadar medium untuk merekam peristiwa, melainkan medium aktif dalam produksi wacana dan memori kolektif. Dalam konteks penyintas perempuan 1965–1966, film dapat berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan wacana negara yang telah lama mendominasi sejarah mereka.

2.2.3. Tragedi 1965–1966: Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Pemulihan

Tragedi 1965–1966 menjadi bagian penting dalam sejarah Indonesia. Pada rentang waktu tersebut, Indonesia mengalami periode kekerasan yang sistematis, terutama terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dipicu oleh penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal oleh Gerakan 30 September (G30S), atau kegagalan kudeta yang dituduhkan kepada PKI oleh rezim Orde Baru (Simpson, 2012). Kemudian, Jenderal Suharto mengambil alih

kendali melalui Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), melangsungkan operasi militer, dan didukung oleh propaganda antikomunis yang lebih luas (Silas, 2021). Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia, yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Sukarno, dan mengantarkan rezim baru di bawah kekuasaan Suharto (Robinson, 2018). Kejadian ini kemudian berujung pada eskalasi kekerasan di berbagai daerah, yang turut menyasar pengikut Sukarno, kelompok kiri pada umumnya, anggota kelompok tani dan serikat buruh, penghayat kepercayaan lokal, hingga komunitas Tionghoa (Eickhoff *et al.*, 2017).

Dalam konteks ini, militer Indonesia memainkan peran utama dalam mengoordinasikan dan mengarahkan kekerasan sebagai bagian dari kampanye antikomunis yang sistematis. Sementara itu, di beberapa wilayah, seperti Jawa Timur, keterlibatan warga sipil juga tercatat, baik dalam aksi spontan maupun dalam bentuk keterlibatan yang lebih terorganisir (Leksana, 2020). Lebih lanjut, menurut van Doorn-Harder (2019) dan Pohlman (2015), perempuan menjadi target khusus, dengan banyak yang mengalami pemerkosaan oleh aparat dan milisi, perbudakan seksual dengan dalih perlindungan, serta pelecehan fisik dan psikis yang mengobjektifikasi tubuh mereka. Keduanya juga mencatat bahwa kekerasan ini tidak dapat dipisahkan dari propaganda militer terhadap Gerwani, organisasi perempuan kiri, mencitrakan mereka sebagai “pelacur”, “monster”, melakukan mutilasi seksual, dan tergabung dalam pesta seks. Stigmatisasi sebagai “janda PKI” memperparah pandangan misoginis terhadap perempuan sebagai sosok dengan seksualitas tak terkendali dan berbahaya, yang mengakibatkan

pembenaran kekerasan terhadap perempuan (Pohlman, 2015). Selain itu, van Doorn-Harder (2019) mengungkapkan bahwa perempuan mantan tahanan kehilangan akses pada layanan sosial, pendidikan anak, dan kegiatan keagamaan seperti haji, karena dianggap “tidak murni” secara spiritual dan nasional.

Selama beberapa dekade setelahnya, diskusi terbuka tentang tragedi ini menjumpai berbagai kendala, selaras dengan dominasi wacana resmi negara yang menegaskan perlunya tindakan terhadap ancaman komunisme saat itu. Situasi ini menyulitkan munculnya wacana alternatif, khususnya yang berasal dari penyintas. Oleh karena itu, upaya untuk memahami berbagai perspektif yang berkembang, dan memperbesar ruang terhadap proses rekonsiliasi bagi mereka yang terdampak, menjadi penting untuk dilakukan (Eickhoff *et al.*, 2017; Cribb, 2002). Beberapa guru mulai mengajarkan versi alternatif tentang tragedi 1965–1966 untuk menyeimbangkan wacana sejarah resmi (Pratama, 2021), sementara penyintas perempuan 1965 membentuk Kelompok Doa Lansia untuk memperkuat solidaritas, ekonomi, dan rekonsiliasi (Bara & Wetangterah, 2023), atau Paduan Suara Dialita, kelompok penyintas yang menulis dan menyanyikan lagu-lagu sebagai bentuk ekspresi, solidaritas, dan resistensi terhadap penghapusan sejarah perempuan dari wacana arus utama (Saraswati, 2022; Weintraub, 2021).

2.2.4. Pengasingan sebagai Strategi Kontrol Politik

Rezim otoriter menggunakan pengasingan sebagai strategi dalam kontrol politik untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaan. Di Indonesia, pengasingan diterapkan terhadap kelompok yang dianggap berbahaya bagi stabilitas rezim. Gerakan Darul Islam dan pemimpinnya, Sekarmaji Marijan

Kartosuwiryo, mengalami pengasingan fisik dan intelektual sebagai bagian dari upaya pengendalian negara (Formichi, 2021). Pengasingan juga berdampak jangka panjang pada individu dan komunitas, seperti yang terlihat dalam pengalaman perempuan Tionghoa-Indonesia setelah kerusuhan 1998, di mana identitas mereka menjadi terbagi-bagi akibat migrasi paksa (Winarnita *et al.*, 2018). Beberapa upaya rekonsiliasi dan peleburan tokoh-tokoh yang diasingkan juga telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya dalam konflik di Papua. Namun, tingkat keberhasilannya beragam, tergantung pada dinamika politik, dan sejauh mana negara siap untuk berdialog dengan kelompok oposisi (Krcmaric & Escribà-Folch, 2022).

Meskipun pengasingan dapat memberikan stabilitas sementara waktu bagi rezim dengan menyingkirkan tokoh oposisi, dalam jangka panjang langkah ini berpotensi meningkatkan ketidakstabilan politik. Para pemimpin dan aktivis yang diasingkan sering kali tetap mempengaruhi politik dari luar negeri. Mereka memanfaatkan dukungan internasional dan mempertahankan hubungan dengan kelompok oposisi di dalam negeri, sehingga tekanan politik terhadap rezim tetap berlangsung (Krcmaric & Escribà-Folch, 2022). Di era modern, kemajuan teknologi komunikasi digital memungkinkan para aktivis yang diasingkan untuk tetap terlibat dalam politik dalam negeri dan melakukan advokasi internasional. Rezim otoriter terus beradaptasi dengan strategi penindasan global, seperti memantau aktivitas digital, dan melemahkan hubungan antara orang-orang yang terasing dengan negara asal mereka, untuk memperluas kontrol otoriter hingga ke luar batas negara, sekaligus menekan pengaruh politik oposisi di pengasingan

(Tsourapas, 2020). Namun, peningkatan globalisasi dan digitalisasi justru memberi ruang bagi gerakan oposisi untuk memperluas pengaruh dan membangun solidaritas, sedangkan rezim otoriter selalu menyesuaikan strategi penindasan mereka.

2.3. Landasan Teori

Interseksionalitas adalah konsep, metode, atau alat analisis yang menunjukkan bagaimana identitas sosial seseorang, seperti etnis, gender, kelas, ras, seksualitas, dan umur, saling berkelindan dan membentuk pengalaman hidup serta ketidaksetaraan mereka (Carbado *et al.*, 2013; Crenshaw, 2013). Interseksionalitas mengkritisi konsep maskulinitas hegemonik oleh Raewyn Connell, yang hanya didasarkan pada gender, dan meminggirkan pengaruh faktor-faktor lain, seperti rasial dan kelas sosial (Christensen & Jensen, 2014). Dalam kajian gender, interseksionalitas menawarkan pendekatan yang lebih inklusif daripada teori gender konvensional, yang kerap kali menyederhanakan pengalaman gender tanpa mempertimbangkan bagaimana berbagai bentuk ketimpangan saling beririsan (Robinson, 2018).

Interseksionalitas adalah konsep yang dikembangkan oleh Kimberlé Williams Crenshaw pada tahun 1989, meskipun gagasan dasarnya sudah lama digunakan dalam studi feminis. Asal mula interseksionalitas berasal dari kritik feminis kulit berwarna bahwa feminisme arus utama terlalu berfokus pada pengalaman perempuan kulit putih kelas menengah (Carbado *et al.*, 2013). Menurut Crenshaw (1991), terdapat tiga jenis interseksionalitas. Pertama,

interseksionalitas struktural, yaitu penindasan yang dialami karena posisi ganda dalam sistem sosial. Misalnya, perempuan kulit hitam yang miskin lebih atau perempuan imigran yang menjadi korban kekerasan domestik terpaksa bertahan karena takut dideportasi atau tidak memenuhi syarat hukum untuk mendapatkan akses layanan pemulihan bagi korban kekerasan. Kedua, **interseksionalitas politik**, yaitu konflik atau ketimpangan dalam representasi politik identitas ganda. Misalnya, aktivisme rasial yang tidak menampung isu gender, begitu pula sebaliknya, atau kekerasan domestik di komunitas kulit hitam kerap disembunyikan karena dikhawatirkan memperkuat stereotip rasial. Ketiga, **interseksionalitas representasional**, yaitu perempuan kulit berwarna sering kali tidak terwakili secara akurat dalam media dan budaya dominan.

Dalam studi sosiologi, Misra *et al.*, (2024) menjelaskan prinsip-prinsip metodologi dalam penelitian interseksionalitas. **Pertama**, penindasan, yaitu mempertimbangkan bagaimana ketimpangan sosial terbentuk melalui relasi kekuasaan. **Kedua**, relasionalitas, yang menunjukkan bahwa keuntungan kelompok dominan terkait langsung dengan kerugian kelompok yang dimarginalisasi. **Ketiga**, kompleksitas, yang menegaskan bahwa identitas sosial dan ketimpangan harus dipahami dalam interaksi yang kompleks atau berkelindan. **Keempat**, konteks, di mana faktor historis, geografis, dan struktural membentuk pengalaman ketidakadilan sosial. **Kelima**, perbandingan, yang digunakan untuk membandingkan berbagai kelompok sosial untuk membongkar pola ketidakadilan. **Keenam**, dekonstruksi, yang menyoroiti bahwa identitas

sosial, seperti gender dan ras, bersifat dinamis atau dapat berubah sesuai konteks sosial.

Sementara itu, seiring perkembangannya, interseksionalitas tidak hanya diterapkan dalam kajian feminis kulit hitam, tetapi juga meluas ke berbagai kajian, termasuk sosiologi. Dalam kajian sosiologi, interseksionalitas digunakan sebagai alat untuk menganalisis ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan. Pendekatan ini menggugat pandangan tradisional dengan menegaskan bahwa gender, kelas, ras, dan faktor lainnya tidak dapat dipisahkan, tetapi justru membentuk tatanan sosial yang memengaruhi pengalaman individu (Ferree, 2018; Gopaldas, 2013). Interseksionalitas juga berperan penting dalam bidang, seperti pendidikan, di mana teori ini digunakan untuk mengkritisi privilese berbasis gender dan ras, serta memperjuangkan hak kelompok yang selama ini dimarginalkan dalam sistem pendidikan (Bhopal, 2020).

Selaras dengan kajian analisis wacana kritis (AWK), interseksionalitas menolak anggapan bahwa pengetahuan yang diproduksi oleh kelompok dominan bersifat netral atau universal, karena perspektif tersebut sering kali mengabaikan pengalaman kelompok marginal yang selama ini tidak mendapatkan ruang dalam diskusi akademik dan sosial. Oleh sebab itu, interseksionalitas berusaha untuk mendemokratisasi produksi pengetahuan, dengan membuka akses seluas mungkin dan memastikan bahwa pengalaman atau pemikiran kelompok tertindas menjadi bagian dari produksi pengetahuan yang sah (Collins *et al.*, 2021). Dalam studi wacana kritis, Esposito (2024) berpendapat bahwa kajian interseksionalitas dalam AWK feminis berfungsi sebagai alat untuk memahami dinamika kekuasaan yang

saling terhubung, di mana sistem sosial dan interaksi menciptakan pola ketimpangan dan diskriminasi yang tidak hanya berbasis gender, melainkan mencakup berbagai bentuk ketidakadilan sosial lainnya. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya prinsip *self-reflexivity* atau refleksi diri yang tinggi, di mana peneliti harus menyadari posisi mereka sendiri dalam struktur akademik dan bias yang mungkin mereka bawa dalam penelitian.

Meskipun interseksionalitas telah diadopsi secara luas, teori ini tidak lepas dari kritik, terutama terkait definisi dan penerapannya. Beberapa pihak menyoroti bahwa dalam konteks akademik neoliberal, interseksionalitas berisiko kehilangan potensi kritisnya dan cenderung dikerdilkan menjadi sekadar alat analisis tanpa mengkritisi ketimpangan struktural, sehingga pendekatan berbasis feminisme Marxis diperlukan untuk memperkuat keterlibatan globalnya (Salem, 2018). Selain itu, dalam penelitian kuantitatif, penerapan interseksionalitas kerap disalahpahami atau disederhanakan hingga kehilangan prinsip-prinsip teoritisnya (Bauer *et al.*, 2021; Robinson, 2018). Seiring perkembangannya, muncul perdebatan apakah interseksionalitas terlalu berpusat pada pengalaman perempuan kulit hitam atau justru dapat diperluas ke kelompok lain yang menghadapi bentuk ketidakadilan berbeda, seperti individu dengan disabilitas dan beragam identitas seksual (Carbado *et al.*, 2013). Keterbatasan penerapan interseksionalitas dalam sejumlah penelitian ini justru membuka peluang untuk studi lebih mendalam dalam konteks sosial dan politik Indonesia.

Dalam konteks penelitian “Analisis Wacana Kritis Film Lagu untuk Anakku tentang Solidaritas Penyintas Perempuan 1965–1966,” pendekatan

interseksionalitas dapat diterapkan untuk memahami bagaimana penyintas perempuan 1965–1966 mengalami berbagai bentuk penindasan yang berlapis. Sebagai penyintas, mereka menghadapi stigma secara ideologi, dan eksklusi secara sosial yang berkepanjangan, sedangkan sebagai perempuan, mereka dijebak dalam struktur masyarakat yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarki. Oleh sebab itu, interseksionalitas dapat berkontribusi dalam analisis yang lebih mendalam.

